

“FRAUD” SEBAGAI RESIKO BISNIS

Oleh Dr.Ahmad Subagyo*

Abstrak:

*Tulisan ini dimaksudkan memberi gambaran awal mengenai apa yang dimaksud dengan Fraud, berdasarkan literatur mengenai Fraud di negara maju (Amerika). Mungkin padanan kata yang terbaik untuk Fraud adalah **KECURANGAN**, dimana hal tersebut hampir seluruhnya senantiasa dilakukan oleh ‘orang dalam’. Tidak ada organisasi yang ‘fraud free’, apalagi di negeri ini yang sangat kental dengan nuansa KKN. Dengan demikian adalah penting bagi kalangan pendidikan tinggi dan praktisi bisnis memahami Fraud. Diharapkan dengan memahami Fraud tersebut, maka akan tumbuh kesadaran untuk memerangnya dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik.*

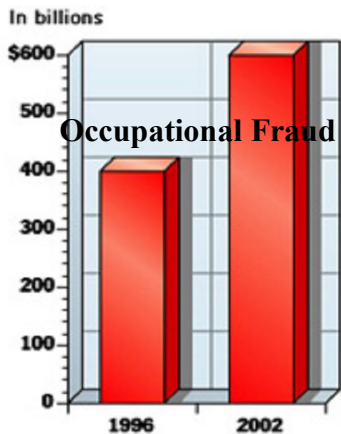
Kata kunci: Fraud, Fraudsters, ACFE, Asset Missappropriation,

Latar Belakang

Fraud adalah ‘musuh dalam selimut’ bagi setiap organisasi. Dalam perusahaan fraud sangat mungkin dilakukan oleh manajemen dan/atau karyawan. Fraud dilakukan dalam berbagai bentuk, dari hal yang sepele hingga yang berat semisalnya korupsi. Negara kita konon adalah salah satu ‘surga’ para *fraudsters* (sebutan bagi mereka yang melakukan fraud), baik di tingkatan lembaga tinggi negara, instansi pemerintah, bahkan juga dikalangan dunia usaha, namun hebatnya semua itu kerap tidak kasat mata.

Fraud harus ditangani secara serius dan sistematis, karena dampak kerusakan yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung adalah sangat besar. Sebagai ilustrasi silmaklah kerugian disebabkan oleh fraud di Amerika dalam figur 1 berikut ini:

* Konsultan the World Bank



Sumber: "2002 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse," published by the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Figur 1 memberi gambaran bahwa fraud yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan (dikenal dengan istilah occupational fraud) tidak saja merugikan dalam jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran kita, namun juga perkembangannya yang sangat pesat hanya dalam jangka waktu 6 tahun telah naik 150% !!, yakni dari \$400 Milyar pada 1996 bertambah \$200 Milyar menjadi \$600 Milyar pada 2002; atau dengan pertambahan rata-rata \$33.33 Milyar pertahun. Barangkali ada baiknya kita menyayangkan bahwa di Indonesia belum ada informasi yang cukup akurat mengenai berapa kerugian akibat fraud di kalangan swasta.

Definisi Fraud.

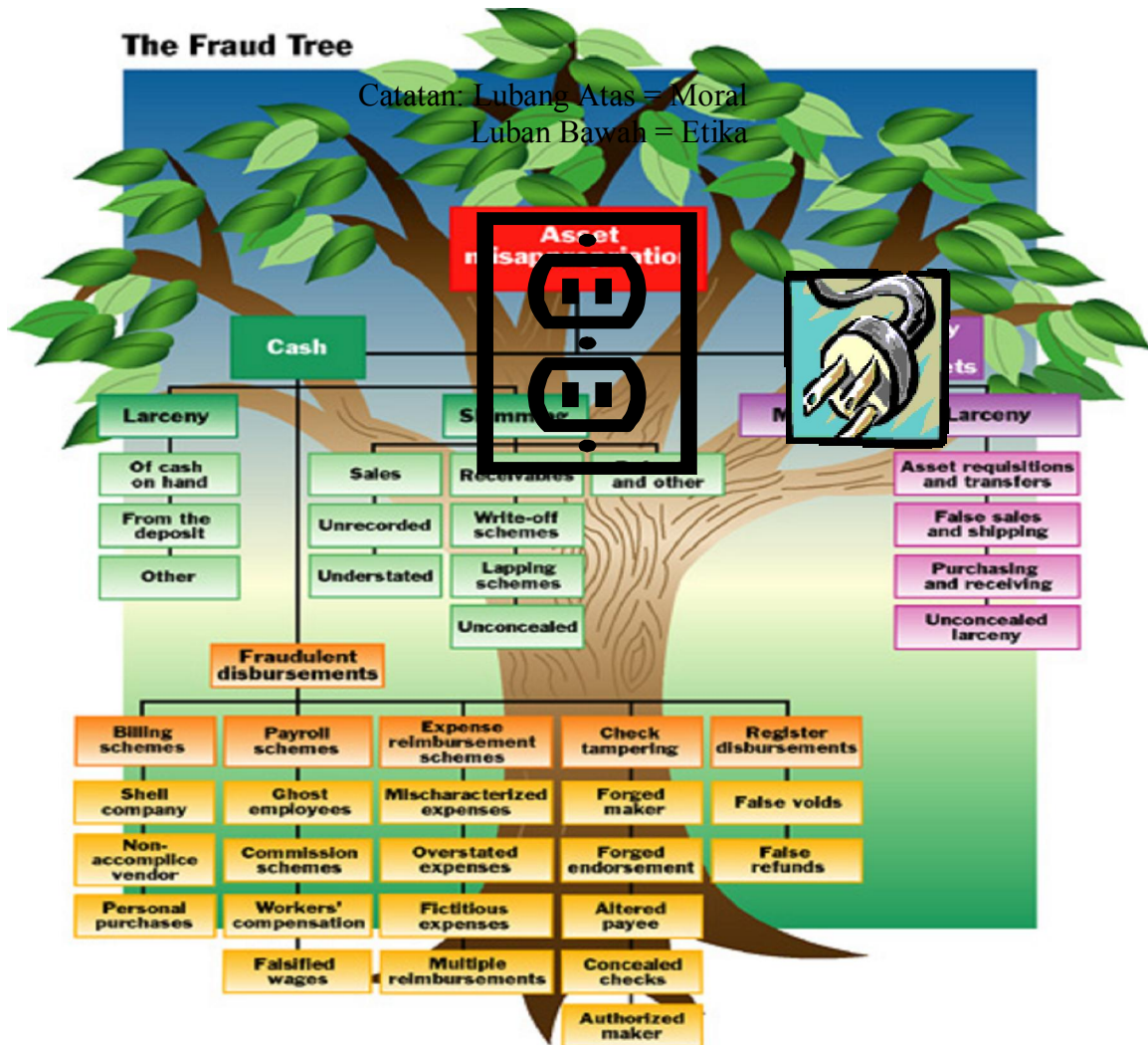
Tidak mudah mendefinisikan fraud. Pengertian atau pemahaman fraud juga dapat berbeda antar negara. Praktek fraud di suatu negara belum tentu dianggap fraud di negara lain, karena pemahaman mengenai fraud juga dipengaruhi oleh tata kehidupan sosial masyarakat, terutama yang menyangkut etika dan moral. Barangkali hal ini dapat dianalogkan dengan '*ketidaksesuaian* (baca:fraud) antara ke-2 gambar ilustrasi pada bagian halaman berikut .

Menurut Fraud Hotline Website, Australia fraud secara umum didefinisikan sebagai "*Fraud is the use of deceit to obtain an advantage or to avoid obligation*". Bentuknyapun dimulai dari hal yang sepele semisal *pilfering stationery* hingga hal rumit seperti korupsi atau *financial statement fraud*. Di Amerika, Association of Fraud Examinator (ACFE) membagi fraud dalam 3 katagori, yakni:

1. Asset Missappropriation
2. Corruption
3. Financial Statement Fraud.

Jenis atau Tipe Fraud.

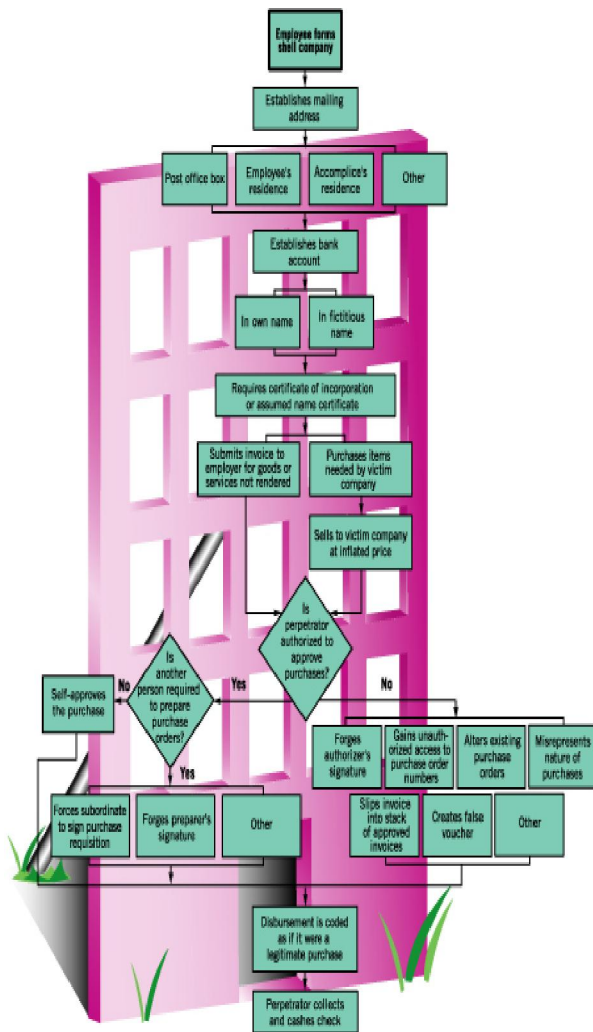
Tipe fraud yang umum dilakukan oleh ‘orang dalam’ adalah yang dikenal dengan sebutan ‘penyalahgunaan harta (asset missappropriation)’. Pengamatan bertahun-tahun di Amerika Serikat memberi informasi yang dapat kita manfaatkan untuk mengenali berbagai jenis penyalahgunaan harta tersebut, yakni ‘Pohon Fraud’ dalam figur dibawah ini:



Sumber : Joseph T. Wells, *Enemies Within*, Journal of Accountancy, December 2001, AICPA.

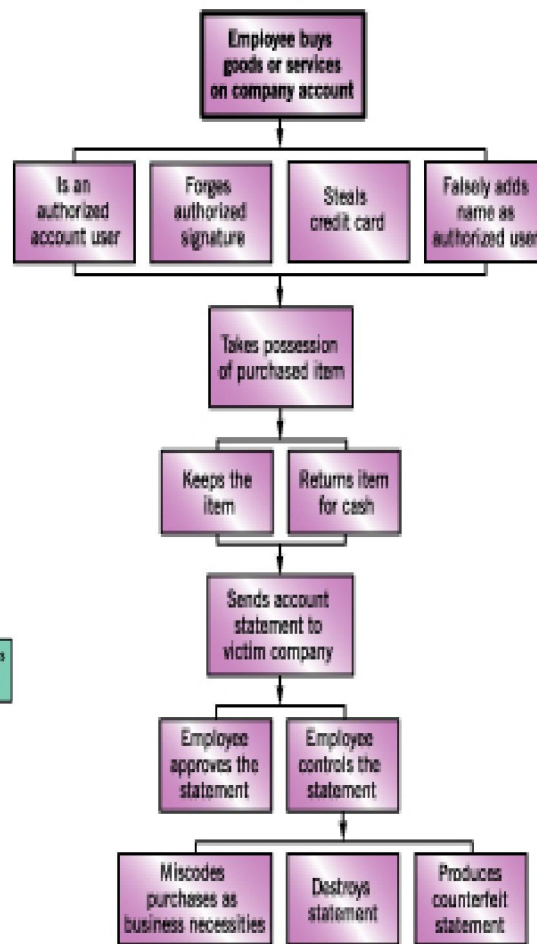
Fraud terhadap uang tunai atau kas adalah yang paling sering dijumpai. Hal ini bukanlah hal yang mengejutkan karena setiap organisasi pasti memiliki kas, dan relatif jauh lebih mudah di-‘curi’ ketimbang harta berwujud lainnya.

Adapun jenis harta lainnya yang kerap dicuri adalah persediaan (inventory). Namun sang fraudster (dan juga kroninya) kerap harus merancang skenario yang cukup ‘canggih’ untuk melakukannya. Strategi usang yang kerap berhasil adalah dengan (i) mendirikan ‘shell company’, yang gambaran skenarionya tampak dalam figur 2 sebelah kiri dibawah ini, atau - tampak figur sebelah kanan - (ii) dengan memanfaatkan posisi/jabatan untuk melakukan pembelian barang dan jasa, dimana hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan pribadi.



Sumber : Joseph T. Wells, *Billing Schemes, Part 2: Pass-Throughs*, Journal of Accountancy, August 2002, AICPA

The ABCs of Pilferage

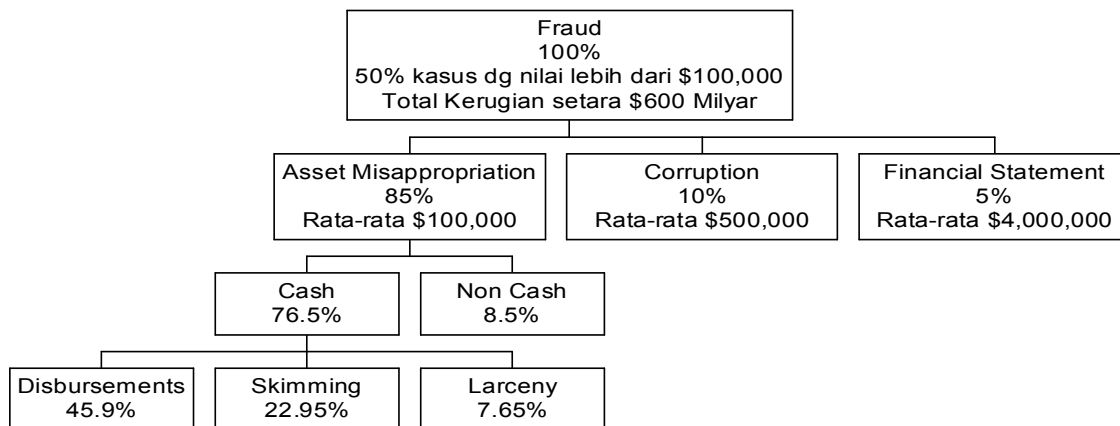


Sumber : Joseph T. Wells, *Billing Schemes, Part 3: Personal Purchase*, Journal of Accountancy, September 2002, AICPA

Tentu saja ada kemungkinan fraud dilakukan oleh pihak eksternal, terutama dengan sasaran pada lembaga keuangan, perbankan dan asuransi. Namun dari jumlah, sangat jarang terjadi. Salah satu contohnya adalah dalam dunia perbankan dikenal istilah 'M Fraud', dimana seorang *walking customer* membobol bank dengan menggunakan aplikasi transfer yang Aspal (asli tapi palsu). Dimana biasanya aplikasi transfernya adalah asli, namun tanda tangan nasabah telah dipalsukan. Bila petugas bank tidak berhati-hati maka sang pembobol dapat dengan mudah lari dengan hasil kejahannya, dan bank harus menanggung kerugian material plus hilangnya kepercayaan nasabah.

Mengapa Fraud Harus diwaspadai?

Survey yang dilakukan ACFE pada tahun 2002 semakin memperkuat keyakinan betapa 'mengerikannya' Fraud tersebut, sebagaimana tampak dalam diagram 1 berikut ini:



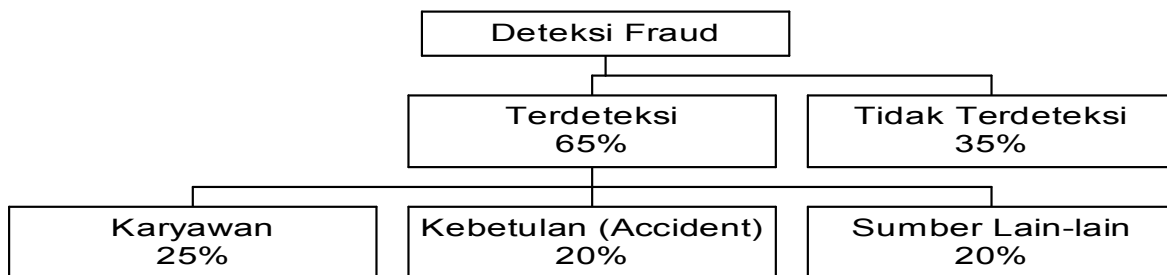
Sumber: Diolah dari Survey ACFE 2002,

Total kerugian yang diakibatkan oleh Fraud di Amerika di berbagai lembaga swasta dan non pemerintah berdasarkan survey pada tahun 2002 diperkirakan bernilai \$600 Milyar, dengan didominasi kasus penyalahgunaan harta (85%). Dan tidak mengherankan bila penyalahgunaan harta didominasi oleh Kas (76.5% dari total nilai Fraud atau 90% dari total kasus asset missappropriation)

Dari sisi nilai, Korupsi dan Fraud Laporan keuangan memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penyalahgunaan harta, namun secara kualitas tingkat

kerugiannya sangat besar. Ini ditunjukkan dengan kerugian rata-rata (median) akibat fraud adalah \$50,000 untuk korupsi dan \$4,000,000 untuk laporan keuangan.

Ditilik dari besarnya kerugian tersebut, timbul pertanyaan apakah memang sulit mencegah dan memberantas fraud? Jawabannya adalah YA ! Diagram 2 semakin menguatkan lagi kesulitan memberantas Fraud.

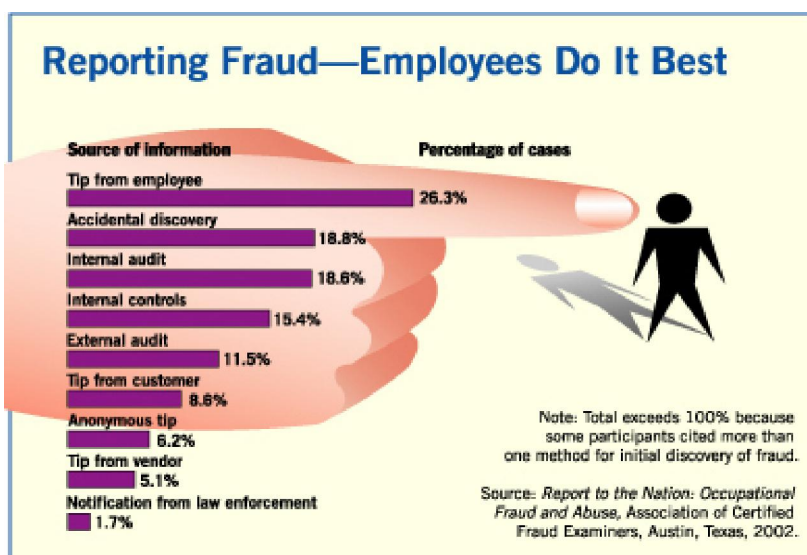


sumber: Diolah dari Survey ACFE 2002,

Ternyata dari hasil survey ACFE, kemungkinan Fraud dapat terungkap hanya 65%, maka tidak mengherankan bila kita menanyakan siapakah yang paling bertanggungjawab untuk mengungkapkan ada tidaknya praktek Fraud disuatu organisasi, maka tidak ada yang bersedia memikul tanggungjawab tersebut.

Akuntan Publik jelas menolak bertanggungjawab, bila dalam hasil pemeriksaannya harus menjamin bahwa sang auditee adalah *fraud free*. Internal Audit juga sama saja, karena baik pemeriksaan internal maupun eksternal senantiasa didasarkan pada audit sampling, maka ada resiko inheren yakni yang dikenal dengan sebutan *audit risk*.

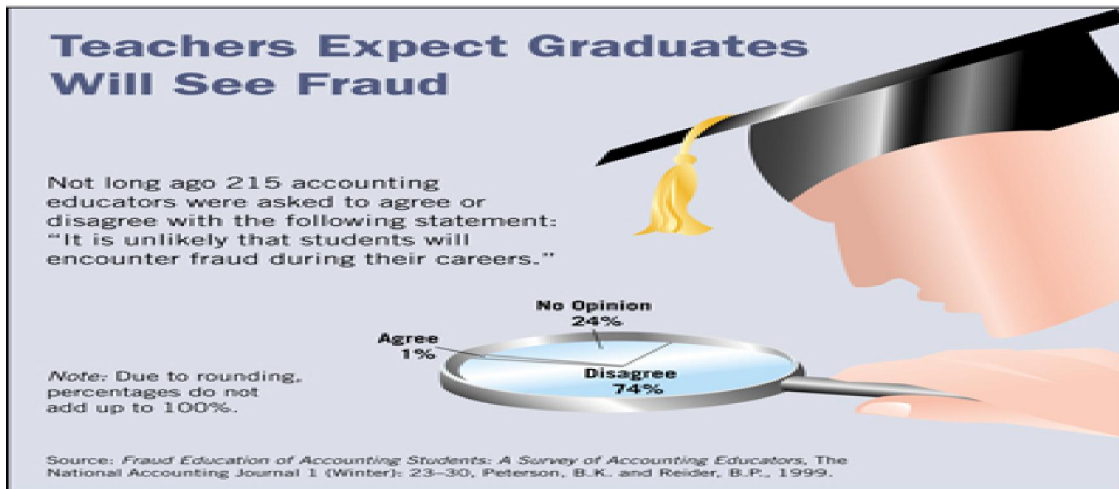
Bahkan jika auditor melaksanakan 100% sampling, toh kemungkinannya hanya 65% fraud dapat terdeteksi.



Figur 3 disamping ini memberi gambaran bahwa kepedulian

karyawan adalah sangat penting dalam memerangi fraud.

Kalangan pendidikan juga menyadari bahwa fraud adalah hal nyata namun sukar untuk ditemui dengan kasat mata, sebagaimana tampak dalam figur 4 berikut



Berikut ini 2 kisah nyata mengenai fraud yang penulis ketahui pernah terjadi.

1. Salah seorang rekan penulis suatu ketika menelpon untuk curhat, karena ia sedang pusing mendapati salah satu staff wanitanya yang dipercaya sebagai pemegang kas kecil (petty cash) ternyata melakukan fraud. Modus operandinya sederhana. Sang kasir sesuai mengajukan pengisian kembali (reimbursement), ternyata diam-diam mengumpulkan kembali bukti atau kwintansi yang telah di-reimburse, untuk kemudian diajukan kembali. Tentu saja ia berhasil karena kwitansi 'aspal' tersebut belum terbuahi cap/stempel "PAID", dan ia memiliki akses ke tempat penyimpanan arsip. Singkat cerita, ketika tindakannya terungkap, ia mengakui bahwa ia telah melakukannya selama 2 tahun terakhir dari 3 tahun masa kerjanya. Diperkirakan sedikitnya ia telah 'menilep' uang perusahaan Rp. 85 juta.
2. Di salah satu perusahaan dimana penulis pernah berkarya, suatu ketika heboh oleh pengungkapan fraud yang dilakukan secara kelompok 16 orang pegawai pabrik. Dipimpin oleh Supervisor produksi, secara berkala ia dengan berbagai cara dengan dibantu kroninya dari bagian

produksi, gudang, hingga Satpam mencuri berbagai komponen produk, untuk kemudian dirakit dirumahnya. Hal ini terungkap secara kebetulan, diawali dengan kecurigaan seorang sales yang menemukan produk kami dijual di pasar loak ! Penelusuran dengan menyewa 'detektif' (baca: intel polisi) kemudian mengungkapkan skema fraud tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan ditempat tinggal sang fraudster ditemukan berbagai komponen produk yang nilainya ditaksir sedikitnya Rp. 800 juta !

Namun sebagaimana halnya di Amerika, ke-2 kasus tersebut tidak dilaporkan oleh manajemen ke polisi. Mereka yang bersalah hanya diminta mengundurkan diri, tanpa pesanggon, dengan imbalan kejahatan mereka tak akan diungkapkan. Alasan klasik yang dikemukakan adalah manajemen khawatir bila fraud dilaporkan secara resmi ke pihak Kepolisian, maka akan merusak citra perusahaan.

Alasan Melakukan Fraud

Sebagaimana bentuk kejahatan lainnya, fraud timbul sebagai akibat bergabungnya 2 macam unsur yakni, **NIAT** dan **KESEMPATAN**.

The Fraud Triangle

Incentive/Pressure

Incentives or pressures on management or other employees to materially misstate the financial statements.

Example. Financial stability or profitability is threatened by economic, industry or entity operating conditions as indicated by significant declines in customer demand and increasing business failures in either the industry or overall economy.

Opportunity

Circumstances that provide an opportunity to carry out a material misstatement in the financial statements.

Example. The nature of the industry or the entity's operations provide opportunities to engage in fraudulent financial reporting due to assets, liabilities, revenues or expenses based on significant estimates that involve subjective judgments or uncertainties that are difficult to corroborate.

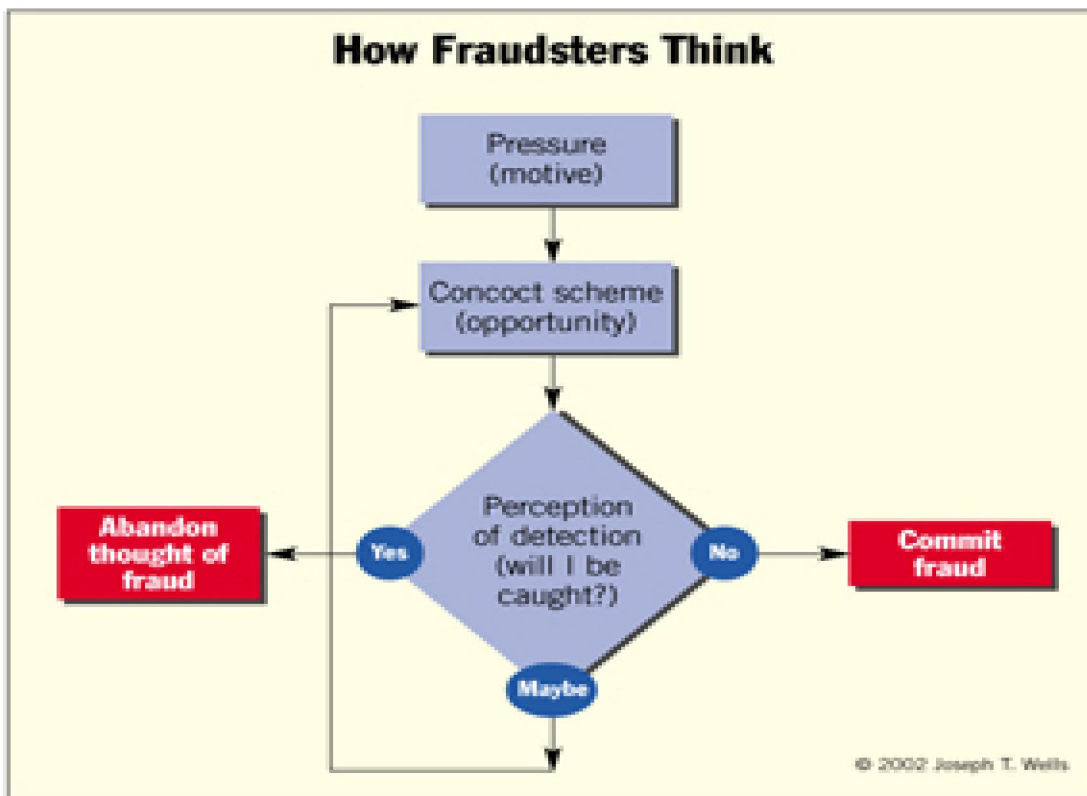
Attitude/Rationalization

An attitude, character or set of ethical values that allows one or more individuals to knowingly and intentionally commit a dishonest act, or a situation in which individuals are able to rationalize committing a dishonest act (e.g., the environment imposes sufficient pressure on them to meet certain goals or targets).

Example. There is a practice by management of committing to analysts, creditors and other third parties to achieve overly aggressive or unrealistic forecasts.

Source: *Occupational Fraud and Abuse*, by Joseph T. Wells, CPA, CFE, Obsidian Publishing Co., 1997. Reprinted with permission.

How Fraudsters Think



Pada awalnya para Fraudster tidak terpikirkan untuk melakukan fraud, namun karena adanya kesempatan, maka mereka kemudian berpikir betapa mudahnya melakukan fraud tersebut, ditambah adanya insentif untuk melakukannya, seperti kelemahan pengendalian internal, sakit hati pada atasan, dsb; maka muncullah justifikasi atau pembenaran untuk melakukannya. Proses ini dapat diuraikan dengan 2 gambar diatas, yakni yang pertama adalah figur 5 *SEGITIGA FRAUD* dan Diagram Alur (Algoritma) *How Fraudster Think*. Namun yang menarik adalah bahwa justru persepsi-lah yang paling menentukan apakah seseorang akan melakukan fraud atau tidak. Semakin kuat persepsi bahwa kejahatannya akan terungkap, maka semakin besar kemungkinan ia tidak akan melakukan fraud.

What's Next?

Dari paparan diatas, tidaklah mengherankan bila ACFE sampai mengeluarkan pernyataan bahwa "FRAUD IS A GLOBAL EPIDEMIC !! ". Namun berbeda dengan penyakit menular atau serangan teroris, epidemi fraud kerap hanya menyerang secara diam-diam, dan jarang menimbulkan kehebohan. Kalaupun ada, kerap ditanggapi secara "biasa-biasa saja" (business as usual), contohnya kasus Enron, QSAR, Bulog Gate, de es be.

Kalau sudah begini, ada yang sebaiknya kita lakukan? Saran yang dapat diajukan:

1. Setiap bisnis pasti memiliki resiko, dan salah satu resiko yang harus di-*manage* dengan baik adalah resiko fraud.
2. Sebagai resiko bisnis, maka fraud **TIDAK DAPAT** dihilangkan. Untuk mengatasinya pendekatan manajemen resiko bisnis dapat dimanfaatkan.
3. Kembangkan *internal control* agar dapat optimal mendeteksi dan mencegah fraud. Bila memungkinkan migitasikan resiko fraud secara spesifik.
4. Lakukan monitoring pada segmen bisnis yang paling beresiko terjadinya fraud.

5. Komunikasikan dengan baik pada seluruh karyawan mengenai pandangan/konsep bisnis dan etika perilaku.
6. Beri pelatihan mengenai FRAUD pada karyawan.

Manajemen Fraud

Langkah pertama dalam manajemen fraud adalah menerima kenyataan bahwa resiko fraud senantiasa ada dan mustahil ditiadakan, kecuali dengan memilih untuk tidak berbisnis ! (No Business meaning no risk and no fraud !).

Sebagaimana halnya resiko bisnis, maka manajemen harus memutuskan tingkat resiko fraud yang masih dapat diterima, dan kembangkan sistem manajemen yang membuat baik manajemen dan karyawan sangat sulit melaksanakan fraud. Ada 2 pendekatan sistem yang dapat dipilih,

1. Prevention System, atau
2. Deterrence System

Prevention System menekankan pada **akar masalah** yang memungkinkan timbulnya motif melakukan fraud. Misalnya saja kesulitan keuangan karyawan. Di sini manajemen biasanya mengatur struktur kesejahteraan karyawan dengan adanya pinjaman lunak untuk pembelian mobil, rumah, atau bahkan pendidikan dan kesehatan.

Deterrence System menekankan pada **rekayasa perilaku**, dengan memberi ancaman hukuman atau sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan fraud. Namun sayangnya kerap justru pendekatan *deterrence* ini memiliki kelemahan, yakni bagi para fraudster justru persepsi-lah yang paling memegang peranan untuk jadi tidaknya melaksanakan fraud. Dengan kata lain sistem pengawasan yang 'pas-passan' saja sudah memadai untuk mencegah fraud, bilamana sistem tersebut telah dipersepsikan oleh manajemen dan karyawan bahwa sistem tersebut telah

Tentu saja dimungkinkan untuk membangun sistem yang merupakan perpaduan antara *Prevention* dan *Deterrence*. Namun tentu saja tidak mudah menjawab pertanyaan apakah sistem tersebut sebaiknya lebih cenderung ke Prevention?,

atau Deterrence, atau 50%-50%? Setiap organisasi harus membangun sistemnya sendiri yang sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Kebanyakan organisasi biasanya mentolerir fraud kecil-kecilan (minor fraud), misalnya *pilfering stationary*, dimana seorang karyawan membawa pulang sebatang pensil seharga Rp. 1.000 untuk dipergunakan pribadi di rumah. Mengapa organisasi mentolerir fraud seperti ini? Jawabannya karena mengembangkan system yang amat ketat jelas sangat sulit dan mahal biayanya; serta disisi lain sistem yang demikian dapat meruntuhkan moral karyawan. Jadi harus mempertimbangkan *cost versus benefit* dalam mengembangkan sistem manajemen fraud.

Penutup

Fraud adalah resiko riil yang harus dihadapi oleh setiap organisasi. Secara ekstrim fraud adalah identik dengan resiko bisnis, dan resiko bisnis tidak dapat dihilangkan. Fraud sebagai resiko harus secara proaktif diidentifikasi dan di-*manage* sebaik mungkin. Akibat terburuk bila terjadinya fraud maka organisasi akan mengalami kebangkrutan, dan bilamana mampu bertahan reputasi telah terlanjur hancur.

Yang dapat dilakukan adalah mengembangkan sistem yang mampu meminimalkan fraud dengan cara mengoptimalkan deteksi dini, dan bila toh fraud terjadi maka carilah jalan terbaik untuk meminimalkan 'kerusakan' yang ditimbulkannya. Kerap terjadi, bahwa bila praktek fraud terbongkar hasil jarahan tidak dapat ditarik kembali secara utuh. Salah satu cara termurah namun efektif untuk mengidentifikasi resiko fraud adalah dengan melakukan *fraud prevention check up*.

Pemahaman mengenai fraud perlu disebar luaskan dengan baik dan benar pada masyarakat, terutama di kalangan pendidikan tinggi. Hal ini terutama berkenaan dengan pandangan pesimistis bahwa lulusan pendidikan dapat dengan mudah mendeteksi fraud dengan bekal pengetahuan yang dimiliki, padahal semakin berkualitas kejahatan fraud, maka semakin besar tingkat kerusakan yang diakibatkannya.

Akhir kata negeri ini membutuhkan suatu generasi baru yang memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai fraud. Yang dengan pemahaman mereka akan semakin 'alergi' terhadap fraud, dan kita akan memiliki harapan kelak negeri ini akan terbebas dari stigma negara KKN nomor wahid di muka bumi ini.

Reference :

1. ICAD - United Financial of Japan, Ltd, " Credit Judgment - Sovereign Credit", Tokyo, December 2001.
2. Jack C. Bailes, Ph.D., and James F. Nielsen, Ph.D; *Using Decision Tree to Manage Capital Budgetting Risk*, Management Accounting Quarterly, Winter 2001.
3. James B. Hare, "So You Want To Go Public?", Management Accounting Journal, December 1994, pp 25-29.
4. Leonard, P Cole, " Cost Analysis and Control in Bank", Bank Administration Institute Toppan Company Ltd. Boston.
5. Masyhudi.Ali, 2002 " Perbankan dan Dunia Usaha", Penerbit Elexmedia Komputindo, Jakarta.